

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) adalah suatu jenis penyakit baru yang sebelumnya tidak pernah diidentifikasi pada manusia. Penyebab COVID-19 adalah virus yang disebut Sars-CoV2, yang merupakan zoonosis atau dapat menular antara hewan dan manusia. Hingga saat ini, sumber hewan penular COVID-19 masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, penularan COVID-19 terjadi melalui droplet saat seseorang batuk atau bersin. Orang yang berada dalam kontak dekat dengan individu yang terinfeksi, termasuk mereka yang merawat pasien COVID-19, memiliki risiko tertinggi untuk tertular penyakit ini. Gejala umum infeksi COVID-19 melibatkan gangguan pernapasan akut, seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas (Kementerian Kesehatan, 2020). Inkubasi COVID-19 biasanya berlangsung selama 5-6 hari, dengan gejala-gejala yang mencakup demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Dalam kasus yang parah, penyakit ini dapat menyebabkan kondisi serius seperti pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan dapat berujung pada kematian (Tosepu et al., 2020). Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, diperkirakan akan menghadapi dampak signifikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada fase awal penyebaran, virus corona baru SARS-CoV2 paling parah menyerang Tiongkok antara Desember 2019 hingga Februari 2020. Pada tanggal 27 Januari 2020, Indonesia mengimplementasikan pembatasan perjalanan di provinsi Hubei, yang saat itu menjadi pusat pandemi COVID-19 di dunia. Seiring waktu, Presiden Joko Widodo menyadari dampak serius infeksi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 (Djalante et al., 2020). Pada periode ini, pasien

pertama yang terdiagnosis COVID-19 di Indonesia memiliki keterkaitan dengan warga negara Jepang di luar negeri (WNA) yang tinggal di Malaysia. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020, dan pada 26 Maret, WHO merilis enam strategi prioritas untuk diimplementasikan oleh pemerintah, melibatkan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, pengembangan rencana respons, dan tindakan lainnya (WHO, 2020). Pandemi ini telah diakui sebagai darurat kesehatan global dan telah menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari. Upaya karantina saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan dampak global dari infeksi virus ini semakin mengkhawatirkan (Sohrabi et al., 2020).

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan Covid-19 di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19 yang menghabiskan biaya sekitar satu triliun rupiah. Dalam implementasinya, pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 tidak merata, terutama di wilayah 3T. Di wilayah ini, masyarakat membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah, mengingat infrastruktur dan layanan kesehatan sulit dijangkau. Kurangnya informasi terkait vaksin Covid-19 di wilayah 3T menyebabkan masyarakat lebih rentan terhadap penyebaran rumor palsu mengenai vaksin tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19 menjadi sangat krusial untuk meyakinkan masyarakat di wilayah 3T.

Nusa Tenggara Timur termasuk daerah 3T ini, banyak wilayah di NTT yang sulit dijangkau karena syarat geografis yang sulit serta infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan banyak Masyarakat di daerah tersebut kesulitan untuk mengakses Pendidikan serta Kesehatan. Karena kurangnya Pendidikan dan

sosialisasi disana sehingga pemahaman akan covid-19 juga terbatas menyebabkan kasus ini meningkat.

Covid-19 dianggap seperti halnya penyakit batuk atau pilek pada umumnya dimana hanya dengan memerlukan obat yang biasa dikonsumsi untuk penyakit tersebut maka dianggap akan sembuh.

Dilihat juga dari factor ekonomi yang lemah pada wilayah NTT, Masyarakat yang terdampak covid enggan untuk ke rumah sakit. Mereka berpikir biaya rumah sakit sangat tinggi dan mereka tidak mampu karena untuk makan saja susah apalagi mengeluarkan biaya untuk rumah sakit,

Kasus covid-19 ini meningkat disebabkan juga kurang patuhnya Masyarakat akan pentingnya menjaga jarak, karena factor kemiskinan yang penulis sebutkan diatas, memaksa masyarakat untuk tetap hidup dan mencari uang seperti biasa. Mayoritas mata pencaharian masyarakat disana yaitu pedagang dan nelayan yang dimana harus berinteraksi dengan banyak orang.

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menyampaikan informasi mengenai risiko dan langkah-langkah pencegahan dengan efektif. Ketidak konsistenan dalam implementasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi perhatian utama. Sebagai contoh, penerapan kebijakan retensi sosial yang komprehensif terlihat kurang efektif.

Menyatukan sistem kesehatan nasional dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dapat memberikan perlindungan kesehatan kepada kelompok yang rentan. Sebagai contoh, membantu keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama periode isolasi melalui program bantuan sosial yang

dibiayai oleh organisasi nirlaba atau dukungan pemerintah, serta memastikan bahwa bantuan langsung disalurkan kepada masyarakat miskin.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai langkah dan kebijakan dalam upaya penanggulangan krisis pandemi. Salah satu tindakan awal yang diambil adalah menyosialisasikan konsep jaga jarak sosial kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19, di mana masyarakat diminta untuk menjaga jarak minimal dua meter, menghindari kontak langsung dengan orang lain, dan menghindari kerumunan massa (Buana, 2020). Namun, kenyataannya, respons masyarakat terhadap tindakan tersebut tidak optimal, yang berdampak pada terus meningkatnya jumlah kasus. Selain itu, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus, layanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia di Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19 juga tidak mencukupi. Berdasarkan latar belakang artikel tersebut, penulis ingin melihat bagaimana Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Pada saat ini, pemerintah Indonesia sedang mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan program vaksinasi bagi warga negara Indonesia (WNI), sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Mengatasi Pandemi COVID-19. Banyak negara bersaing dalam memproduksi vaksin karena selain berperan dalam penanggulangan pandemi, vaksin juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan selalu diminati.

Vaksinasi merupakan tindakan efektif dan efisien dalam upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah berbagai penyakit menular berbahaya. Sejarah telah menunjukkan kontribusi besar vaksinasi dalam menyelamatkan penduduk dunia dari penyakit, cacat, dan kematian yang dapat dicegah melalui vaksin (PD3I).

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, tujuan dari vaksinasi COVID-19 adalah untuk mengontrol penyebaran dan penularan virus tersebut, serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) merupakan target utama yang diharapkan dapat diterapkan dalam masyarakat, dengan maksud melindungi masyarakat dari COVID-19 dan menjaga kelangsungan produktivitas sosial dan ekonomi (Kementerian Kesehatan, 2021). Pemerintah telah menetapkan kebijakan vaksinasi COVID-19 sebagai langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat (Saraswati dan Sunarta, 2021). Implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dipercayai akan tercapai dengan baik apabila pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait (Puteri et al., 2022).

Solusi vaksin ini menimbulkan kontroversi di kalangan sebagian masyarakat karena adanya keraguan terhadap waktu pengembangan vaksin yang relatif singkat, yakni sekitar satu tahun, berbeda dengan vaksinasi lain yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Hal ini menciptakan kekhawatiran di antara masyarakat terkait efek samping vaksin dan dampaknya pada kesehatan mereka (Pranita, 2020). Oleh karena itu, persepsi dan perilaku manusia menjadi tolak ukur dalam memahami kesadaran mereka. Penyebaran informasi palsu memiliki dampak signifikan pada persepsi dan sikap masyarakat terhadap vaksin virus corona. Keputusan dan pilihan cenderung lebih dipengaruhi oleh berita online, terutama melalui media sosial. Cara masyarakat memandang vaksin Covid-19 mencerminkan reaksi atau penerimaan mereka terhadap informasi yang mereka terima mengenai keyakinan terhadap

keamanan vaksin, kemauan untuk menjalani vaksinasi, dan kepercayaan pada kemampuan petugas kesehatan dalam memberikan vaksin Covid-19. Sebagai akibatnya, permintaan terhadap vaksin Covid-19 di provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi sangat rendah. Informasi ini juga menjadi alasan kuat mengapa pasien yang terinfeksi tidak melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, penanganan COVID-19 harus difokuskan pada pencegahan yang kuat untuk mencegah penularan lebih lanjut, termasuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker dengan minimal tiga lapisan, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dan memperkuat daya tahan tubuh melalui pola makan sehat, olahraga, serta gaya hidup yang sehat (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2020).

berdasarkan fenomena terkait masalah penyebaran covid-19 dan pelaksanaan kebijakan vaksinasi diatas maka peneliti tertarik buat melakukan penelitian tadi menjadi topik penyelesaian skripsi menggunakan judul “IMPLEMENTASI *BUSINESS INTELLIGENCE* UNTUK MENGANALISIS PERBANDINGAN PENYEBARAN KASUS COVID-19 SEBELUM VAKSINASI DAN SETELAH VAKSINASI COVID-19 DI NTT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar bekakang diatas, penulis menguraikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara penerapan *business intelligence* dalam perbandingan kasus penyebaran covid 19 sebelum vaksinasi dan setelah vaksinasi di NTT?

- b. Bagaimana perbandingan kasus penyebaran covid 19 sebelum vaksinasi dan setelah vaksinasi di NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Mengetahui perbandingan kasus penyebaran covid 19 sebelum vaksinasi dan setelah vaksinasi di NTT
2. Mengetahui penerapan *business intelligence* dalam perbandingan kasus penyebaran covid 19 sebelum vaksinasi dan setelah vaksinasi di NTT

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan peneliti mengenai implementasi *business intelligence* untuk menganalisis perbandingan penyebaran kasus covid 19 sebelum vaksinasi dan setelah vaksinasi di NTT serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa S1 Sistem Informasi dan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait topik penelitian ini.

1.4.2 Praktis

1. Dapat dijadikan masukan untuk pemerintah NTT dalam penanganan kasus penyebaran covid 19.
2. Dapat dipergunakan sebagai bahan pengetahuan, keilmuan, dan pemahaman tentang penerepan *business intelligence*